



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan II

selanjutnya disebut pihak pertama

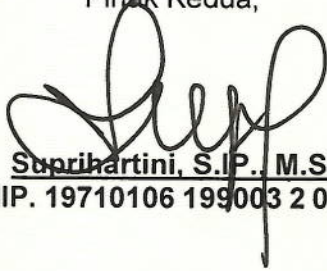
Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 8 Agustus 2025
Pihak Pertama,


Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19700706 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan DPR RI			
1.	Terlaksananya dukungan dukungan penyusunan, harmonisasi, pembahasan Rancangan Undang-Undang, Pemantauan Undang-Undang dan Perancangan Peraturan DPR RI	1. Persentase capaian dukungan penyusunan, harmonisasi, pembahasan Rancangan Undang-Undang, Pemantauan Undang-Undang dan Perancangan Peraturan DPR RI	100%
		2. Persentase capaian dukungan kegiatan penyebarluasan Undang-Undang	100%
2.	Terlaksananya dukungan penyusunan daftar Prolegnas tahunan	1. Persentase capaian dukungan pelaksanaan dan penyusunan Prolegnas	100%
3.	Terlaksananya dukungan pembahasan RUU RAPBN, APBN-P, pertanggungjawaban APBN dan rekomendasi kebijakan dalam pembahasan APBN	1. Persentase capaian dukungan pembahasan RUU RAPBN, APBN-P, pertanggungjawaban APBN dan rekomendasi kebijakan dalam pembahasan APBN	100%
4.	Tersedianya dukungan rekomendasi hasil pemeriksaan terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK RI	1. Persentase capaian dukungan penelaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK RI	100%
5.	Terlaksananya dukungan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan Anggota DPR RI	1. Persentase capaian dukungan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan Anggota DPR RI	100%
6.	Terlaksananya dukungan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang dimanfaatkan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	1. Persentase capaian dukungan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI yang dimanfaatkan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	100%
7.	Terlaksananya dukungan tata beracara dan penegakan kode etik DPR yang dimanfaatkan untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	1. Persentase capaian dukungan penanganan perkara etik untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI	100%



B. Program Dukungan Manajemen			
8.	Meningkatnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna lainnya atas kinerja Biro Persidangan II	3,74
		2. Persentase capaian layanan dukungan rapat dan tata usaha di Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus	100%

Program	Anggaran
Satker Dewan	Rp414.442.631.000,00
CF. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan DPR RI	Rp414.442.631.000,00
Satker Setjen	Rp2.997.541.000.00
WA. Program Dukungan Manajemen	Rp2.997.541.000.00

Deputi Bidang Persidangan,


Suprihartini, S.IP., M.Si
 NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 8 Agustus 2025
 Kepala Biro Persidangan II,


Djujiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
 NIP. 19700706 199803 1 005

